



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

Skripsi

**PERAN SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL (SKAI) DALAM PENILAIAN
RESIKO KREDIT INVESTASI UNTUK MENGURANGI TINGKAT NON
PERFORMING LOAN (NPL)
(STUDI KASUS PADA PT. BNI 46 (PERSERO) CABANG UTAMA PADANG)**

Oleh :

SUVINO YULIANDROFI
04 153 028

JURUSAN AKUNTANSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi**

**PADANG
2009**

ABSTRAK

Meningkatnya kredit macet pada Bank-bank di Indonesia menjadi suatu pemikiran bagi penulis untuk melakukan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan audit internal dalam penilaian resiko kredit investasi untuk mengurangi tingkat Non Performing Loan (NPL).

Penelitian ini dilakukan di PT Bank Negara Indonesia Tbk Cabang Utama Padang. Sedangkan alat pengumpulan data, penulis melakukan wawancara dan observasi langsung ke lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisa data yang dilakukan dengan melihat dari dua segi, yaitu antara teori yang telah diperoleh dibandingkan dengan kenyataan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dengan dilaksanakannya audit internal oleh Satuan Kerja Audit Internal, ternyata pemberian kredit sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan tingkat NPLnya terbukti makin kecil. Jadi pelaksanaan audit internal terbukti dapat mengurangi risiko kredit investasi.

Kata kunci : audit internal, investasi, NPL



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta merata baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mutlak dilaksanakan pembangunan di segala bidang dengan menggunakan pedoman yang ada dalam GBHN. GBHN memberi amanat luhur bagi bangsa Indonesia, yaitu untuk melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan nilai-nilai pancasila. Oleh karena itu pembangunan dan hasil-hasil pembangunan harus merata dan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Dalam usaha mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut maka pemerintah mengarahkan khususnya pada bidang ekonomi, dimana pemerintah memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha yang dilaksanakan melalui langkah-langkah dan kebijaksanaan untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan yang diharapkan.

Diantara berbagai kebijakan ekonomi yang dilaksanakan, bidang perbankan merupakan salah satu bidang yang mendapat perhatian pemerintah karena bank merupakan salah satu sumber permodalan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Perusahaan perbankan merupakan salah satu tulang punggung penting dalam pembangunan nasional. Di dalam kerangka perbankan nasional, perusahaan

perbankan diharapkan untuk berperan serta dalam mendorong pembangunan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan memberikan akses finansial kepada mereka. Peran perusahaan perbankan juga menjadi semakin penting sejalan dengan program pemerintah untuk mendukung dan mengembangkan UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian. Oleh karena itu, kinerja dan kesehatan perusahaan perbankan menjadi sangat penting.

Penyaluran kredit merupakan kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana bank. Penggunaan dana untuk penyaluran kredit mencapai 70% - 80% dari volume usaha bank. Oleh karena itu sumber utama pendapatan bank berasal dari kegiatan penyaluran kredit dalam bentuk pendapatan bunga untuk bank konvensional dan bagi hasil untuk bank syariah. Terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran kredit tersebut disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, sifat usaha bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dengan unit defisit. Kedua, penyaluran kredit memberikan *spread* yang pasti sehingga besarnya pendapatan dapat diperkirakan. Ketiga, melihat posisinya dalam pelaksanaan kebijaksanaan moneter, perbankan merupakan sektor usaha yang kegiatannya paling diatur dan dibatasi.

Dalam melakukan pemberian kredit, suatu bank haruslah menganut prinsip kehati-hatian. Kesalahan dalam memberikan akan memberikan resiko yang sangat besar. Resiko tersebut dapat berupa resiko tidak tertagihnya piutang dan terlambatnya penerimaan piutang dari jadwal, sehingga akan menimbulkan kredit macet. Apabila jumlah kredit macetnya meningkat, maka pihak bank akan mengalami kesulitan dalam hal likuiditasnya jika sewaktu-waktu terjadi penarikan dana dalam jumlah

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

BNI menghadapi beberapa risiko yang berkaitan dengan kredit yang diberikan. BNI dalam manajemen risiko adalah memastikan agar BNI dapat memahami, mengukur dan mengawasi berbagai risiko yang timbul serta agar BNI dapat sebaik mungkin mematuhi kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dalam mengatasi risiko yang dihadapi.

Risiko kredit adalah risiko atas kemungkinan terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan/ cedera janji debitur atau pihak kedua lainnya dalam memenuhi persyaratan dan kondisi yang telah disepakati dan ditetapkan dalam perjanjian dengan pihak Bank. Tujuan utama BNI adalah menjaga kualitas kredit yang diberikan, memaksimalkan tingkat pengembalian (*return*) dan meningkatkan efisiensi operasi. BNI telah menata kembali struktur organisasi dalam proses kredit yang diberikan berdasarkan pengawasan dan pengendalian yang ketat melalui pemisahan fungsi proses kredit dan penilaian risiko kredit. Untuk meningkatkan mekanisme pengawasan yang solid, BNI menerapkan kebijakan kredit yang diberikan yang jelas (meliputi penentuan dan pengukuran tingkat risiko), analisis kredit, penilaian agunan, persetujuan kredit, dokumentasi pemberian dan pencairan kredit, serta fungsi pemeriksaan, pengawasan, dan pelaporan yang berkesinambungan setelah kredit tersebut dicairkan, dimana masing-masing tugas tersebut dilakukan oleh divisi atau unit yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Alvin A. and James K. Loebbecke, 2003, *Auditing An Integrated Approach*, 8 Edition, New Jersey; Prentice Hall Inc, 2000
- Hiro Tugiman, 1997. **Standar Profesional Audit Internal**, Cetakan Ke-5, Yogyakarta : Kanisius
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2002, **Standar Akuntansi Keuangan**, Jakarta : Salemba Empat
- Komaruddin, **Ensiklopedia Manajemen**, Edisi Kedua Jakarta : Bumi Aksara 1994
- Moeller Robert, **Brink's modern Internal Auditing**, Edisi Kelima : John Wiley & Sons Inc
- Mulyadi Dan Kanaka Puradiredja 1998, **Auditing**, Edisi Ke-5 Jakarta : Salemba Empat
- Peraturan Bank Indonesia No: 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 **tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.**
- Sawyer, Lawrence B., "The Manager and The Modern Internal Auditor", A. Problem Solving Partnership, Amacom, 1979, New York
- S. Munawir , 2002 **Analisa Laporan Keuangan** , Edisi Keempat, Cetakan Lelima, Yogyakarta : Liberty
- Sinungan, Muchdarsyah, "Manajemen Dana Bank", Edisi kedua, Jakarta : Bumi Aksara, 2002
- SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, **Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank**
- Sukrisno Agoes. 1996. *Auditing*. Edisi Kedua. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Suparman. 2001. *Fungsi Komite Audit Independen*, Bahan PPL IAI Cabang Jakarta.